



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**RABU, 30 MEI 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

# Pemprov Optimis Bisa Dapat WTP

## 8 Kab/Kota Gagal WTP

**BENGKULU** - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyelesaikan pemeriksaan LKPj dari

kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Hasil LHP nya, hanya dua kabupaten yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Yakni Kabupaten Mukomuko dan Lebong.

☞ Baca **PEMPROV.** Hal 23

Sambungan dari hal 14

Sedangkan lainnya, Kota Bengkulu, Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Rejang Lebong dan Seluma mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sebagaimana diketahui bahwa WTP yang diraih oleh Pemkab Lebong adalah yang kali keduanya setelah tahun sebelumnya juga mendapat predikat yang sama.

Sedangkan Pemkab Mukomuko terakhir kali mendapatkannya predikat WTP pada tahun 2013 lalu. Penyerahan LHP ini dilakukan langsung kepada masing-masing Bupati dan Penjabat Walikota di kantor BPK di jalan Adam Malik Kota Bengkulu, Senin (28/5). Sedangkan untuk LHP LPJK Pemerintah Provinsi Bengkulu baru akan diserahkan pada Kamis (31/5).

Plt Gubernur Bengkulu Dr. Drh. H. Rohidin Mersyah, M.MA optimis pemprov akan mendapatkan WTP karena menurut dia selama ini usaha yang telah dilakukan sudah maksimal.

"Kalau pemprov Kamis baru diser-

ahkan. Kita berusaha sudah maksimal. Terutama temuan yang sifatnya administratif maupun kerugian negara sudah kita tindaklanjuti dengan maksimal. Ya mudah-mudahanlah, insya Allah (dapat WTP)," tutur Rohidin.

Sementara itu, menurut Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Juanda, SH, MH, daerah yang belum mendapat WTP artinya belum melaksanakan azas-azas penyelenggaraan pemerintahan dengan baik. "Artinya masih ada beberapa kelemahan baik dibidang keuangannya yang mungkin belum efektif, belum efisien atau bisa jadi tidak sesuai dengan usulan, sasaran dan tujuannya. Kemudian mungkin ada kelemahan dari SDM nya," ujar Juanda.

Namun, WTP itu kata Juanda hanya formalitas untuk mengetahui hasil penilaian secara formil bahwa daerah itu dianggap sudah melakukan pengelolaan pemerintahan dengan baik sesuai dengan Undang-undang dan azas-azas pemerintahan yang baik dalam hal pengelolaan keuangannya.

"Tapi bukan berarti daerah yang mendapatkan WTP itu tidak ada

tindakan yang melanggar hukum. WTP bukan jaminan di daerah itu tidak terjadi pelanggaran hukum atau katakanlah tindakan atau perbuatan yang mengarah kepada tindakan korupsi. Bukan berarti bahwa di daerah itu bersih dari tindakan korupsi," kata Juanda.

Karena contohnya sudah ada. "Dulu kan pernah ada daerah yang dapat WTP ternyata kepala daerahnya tersandung juga kasus korupsi. WTP itu kan hanya penilaian formil saja untuk melihat dan menilai apakah daerah itu sudah menjalankan pengelolaan keuangannya dengan baik. Apakah antara program dengan pelaksanaannya sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Saya pikir ini cuma strategi pemerintah agar daerah-daerah itu bersemangat untuk menjalankan pengelolaan keuangan yang baik," jelas Juanda.

Namun bagaimana pun, lanjut Juanda ini adalah sebuah raport untuk daerah yang harus diumumkan untuk diketahui oleh publik sehingga pemerintah di daerah itu bisa berbenah ke depannya dan terpacu untuk mengevaluasi aparatnya. (tew)